



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Simpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen-dokumen KP3A ABC (Thailand) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. PPh pemotongan dan pemungutan yang selama ini dilakukan KP3A ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23.
2. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban PPh dibayar sendiri.
3. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban PPN/PPnBM.
4. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak daerah.
5. KP3A ABC (Thailand) melapor SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulannya. Tetapi tidak melapor SPT Tahunan karena tidak diwajibkan. Diketahui bahwa dasar hukum pengecualian ini belum jelas.
6. Semua kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) dilakukan dengan taat aturan sesuai dengan perlakuan perpajakan selayaknya kantor perwakilan bentuk KP3A.

B. Saran

Setelah mendapat kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis dokumen-dokumen yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode studi kasus dengan *multiple case* atau pendekatan penelitian kualitatif lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membandingkan kewajiban perpajakan antara *representative office* perusahaan luar negeri dengan *permanent establishment* (Bentuk Usaha Tetap).
3. Untuk dasar hukum yang mengatur kewajiban kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing untuk melapor SPT Tahunan sebaiknya ditegaskan dalam dasar hukum yang jelas untuk memberikan wajib pajak rasa kepastian dan menghindari adanya kesalahan lebih lanjut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.